

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Batas Wajar Pembuatan Jumlah Akta Oleh Notaris Menurut Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dan Undang-Undang Jabatan Notaris**”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Prosedur oleh notaris dalam membuat akta melebihi batas kewajaran menurut DKP INI dan UUJN dan Sanksi etika dan administratif terhadap notaris yang melanggar jumlah pembuatan akta perhari sebagaimana diatur dalam Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Meskipun adanya Peraturan DKP INI No.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari yaitu 20 akta perhari namun di dalam prakteknya masih banyak notaris yang melanggar peraturan tersebut, karena didalam UUJN tidak terdapat pasal yang secara spesifik mengatur mengenai jumlah batas wajar pembuatan akta perhari. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Peraturan DKP INI No.1 Tahun 2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta tersebut, notaris dapat terindikasi melanggar tanggung jawab dan wewenang seorang notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana di atur dalam UUJN. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa: (1) Walaupun di dalam UUJN tidak secara *eksplisit* mengatur tentang pembatasan jumlah akta perhari akan tetapi apabila notaris melanggar peraturan tersebut maka notaris dapat terindikasi melanggar prosedur pembuatan akta otentik yang telah ditetapkan oleh UUJN. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu membuat akta otentik tidak terburu-buru serta lebih teliti lagi sesuai dengan prosedur yang di atur di dalam UUJN, hal tersebut dilakukan agar akta otentik yang di buat oleh notaris sempurna dan tidak dapat kehilangan otentisitasnya. (2) Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017 yang merupakan terusan dari Pasal 4 ayat (16) KEN, yang mengatur mengenai batas wajar pembuatan akta perhari oleh notaris, apabila notaris melanggar peraturan tersebut notaris telah melanggar tanggung jawab etika karena melanggar peraturan KEN dan dapat dikenai sanksi etika selain itu notaris juga melanggar tanggung jawab administratif yang mengakibatkan notaris dapat dikenakan sanksi administratif yaitu karena tidak mematuhi perintah UUJN khususnya yang di atur dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 9 UUJN.

Kata Kunci: *Notaris, Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Batas Wajar Pembuatan Akta Notaris.*

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Fair Limit of Deed Amount Made by a Notary According to the Honorary Board of the Central Indonesian Notary Association (DKP INI) and the Act of Notary (UUJN)", with 2 (two) issues namely procedure by a notary in making deeds exceeding the fairness according to the DKP and UUJN and Sanctions ethics and administration of a notary who violates the number of deeds made per day as stipulated in DKP INI Regulation No. 1 of 2017. This research is a normative research that is research based on primary legal material. The approach used in this study are the statute approach, the conceptual approach and the case study. Despite the existence of DKP INI Regulation No.1 of 2017 concerning Fairness Limits for the Establishment of the Deed of 20 deeds per day but in practice there are still many notaries who violate these regulations, because in the UUJN there are no article specifically regulating the amount of fair deed for daily deeds. However, if it is related to the provisions stipulated in UUJN, violations committed by a notary public against DKP INI Regulation No.1 of 2017 concerning the fairness of making the deed, the notary may be indicated as violating the responsibility and authority of a notary in making authentic deeds as set in UUJN. The results of this thesis show that: (1) Although the UUJN does not explicitly regulate the limitation of the number of deeds per day but if the notary violates these regulations, the notary may be indicated as violating the authentic deed procedure established by UUJN. Therefore, it is necessary to have a limitation so that the notary in carrying out his job duties is to make authentic deeds in no hurry and more thorough in accordance with the procedures set out in UUJN, this is done so that authentic deeds made by a notary are perfect and cannot be lost authenticity. (2) DKP INI Regulation No. 1 of 2017 which is a continuation of Article 4 paragraph (16) KEN, which regulates the fair limit of making a deed per day by a notary, if the notary violates the regulation the notary has violated ethical responsibility for violating KEN regulations and can subject to ethical witnesses other than that the notary also violates administrative responsibilities resulting in a notary being subject to administrative witnesses, namely because they do not comply with the UUJN's orders, specifically those regulated in Article 4 of the UUJN and Article 9 UUJN.

Keywords: Notary, Notary Code of Ethics, Notary Honorary Board, Fair Limit for Making Notary Deed.